SKRIPSI

FENOMENA BROKER POLITIK DI MASYARAKAT KELURAHAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

TRI YANSA PUTRA
07021181621150

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

SKRIPSI

FENOMENA BROKER POLITIK DI MASYARAKAT KELURAHAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Sriwijaya

TRI YANSA PUTRA
07021181621150

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

FENOMENA BROKER POLITIK DI MASYARAKAT KELURAHAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh

Tri Yansa Putra

07021181621150

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Zulfikri Suleman, M.A	Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195907201985031002	NIP. 195910241985032002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul " **Fenomena Broker Politik Di Masyarakat Kelurahan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019"** telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 18 Desember 2020

Ketua:

1. Dr. Zulfikri Suleman, M.A
   NIP. 195907201985031002 .....

Anggota:

2. Dra. Eva Lidya, M.Si
   NIP.195910241985032002 .....

3. Dr. Yunindywati, S.Sos., M.Si
   NIP. 197506032000032001 .....

4. Gita Isyanawulan, S.Sos, M.A
   NIP. 198611272015042003 .....

Mengetahui

Dekan Fisip	Ketua Jurusan Sosiologi
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si	Dr. Yunindyawati, S.Sos. M.Si
NIP 196311061990031001	NIP 197506032000032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Yanca putra

NIM : 07021181621150

Jurusan : Sosiologi

Konsentrasi : Perencanaan Sosial

Judul Skripsi : Fenomena Broker politik di Masyarakat kelurahan Muara kelingi kabupaten Musi Rawas Pada pemilihan Legislatif tahun 2019

Alamat : Jl. ketayu RT 05 Kel. Muara kelingi, kec. Muara kelingi, kab. Musi Rawas Prounsi Sumatera Selatan

No.HP : 085382817579

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimanan mestinya.

Indralaya, 20 Desember 2020
Yang buat pernyataan,

METERAI TEMPEL
47C61AHF867830461
6000
ENAM RIBU RUPIAH

.....
NIM 07021181621150

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Fenomena Broker Politik Di Masyarakat Kelurahan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019**" dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya. Namun penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pembacanya.

Pertama terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Ibunda **Sariah** dan Ayahanda **Kamis**. Penulis juga menyadari bahwa proses penyusunan skripi ini mulai dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dari lembaga kampus Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta masyarakat di kelurahan Muara Kelingi yang telah mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terkait topik tersebut. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSC. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
7. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

8. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir dan sekaligus sebagai pembimbing akademik.
9. Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran dalam proses menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
10. Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dengan ikhlas dan sabar dalam berbagi selama proses perkuliahan.
11. Seluruh staff dan karyawan Sosiologi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah melancarkan proses admintrasi dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
12. Untuk saudara/I ku Ramia, Windi, Riski, Ulan yang sudah memberikan semangat selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
13. Untuk teman saya Wahyu Nur Hidayat, Enggi Frimansyah, M. Akbar Ray dan Bacharudin Ismail yang sudah membantu moril dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
14. Seluruh pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari ketidaksempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 2021

Penulis

Tri Yansa Putra
07021181621150

ABSTRAK

Fenomena broker politik merupakan suatu masalah yang sering terjadi ketika pemilihan umum legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif seseorang untuk menjadi broker politik dan dampak negatif adanya praktek broker politik dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi Alfard Schutz. Metode penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif deskritif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purpose sampling dengan informan berjumlah 7 orang yang terdiri dua orang informan kunci, tiga orang informan utama dan dua orang informan pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang menjadi broker politik pada di masyarakat kelurahan Muara Kelingi pemilihan legislatif tahun 2019 atas tindakannya yang berorientasi ke masa depan (in-order-to-motive) atau motif untuk dan motif yang berorientasi ke masa lalu (because motive) atau motif sebab. Motif untuk terbagi menjadi enam yaitu untuk menjaga hubungan kekerabatan, untuk menjaga ikatan pertemanan, untuk menolong, untuk mendapatkan pendapatan, komitmen kemudahan mendapatkan pekerjaan dan komitmen biaya berobat. Motif sebab terbagi dua yaitu belajar dari kumpul-kumpul dengan teman-teman dan belajar dari pemilihan legislatif masa lalu. Dampak negatif adanya praktek broker politik pada pemilihan legislatif tahun 2019 di masyarakat kelurahan Muara Kelingi yaitu sikap masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintah, membuat kerukunan dan keharmonisan terganggu dan tidak berjalannya pemilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang.

Kata kunci : Broker Politik, Pemilihan Legislatif.

Indralaya, 22 Desember 2020

Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Zulfikri Suleman, M.A	Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195907201985031002	NIP. 195910241985032002

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Yunindyawati, S.Sos. M.Si
NIP 197506032000032001

ABSTRACT

The phenomenon of political brokerage is a problem that often occurs during legislative elections. This study aims to determine a person's motives for becoming a political broker and the negative impact of the practice of political brokerage in the 2019 legislative elections. The theory used is Alfard Schutz's phenomenological theory. This research method used is descriptive qualitative. Sources of data obtained from primary data through observation, interviews and documentation. The technique of determining the informants used purpose sampling with 7 informants consisting of two key informants, three main informants and two supporting informants. The results of this study indicate that someone who became a political broker in the 2019 legislative election in the community of Muara Kelingi village for his in-order-to-motive actions or motives for and motives that are oriented to the past (because motive) or a cause motive. The motives are divided into six, namely to maintain kinship, to maintain friendship, to help, to earn income, commitment to ease of getting a job and commitment to medical costs. The motive for the cause is divided into two, namely learning from hanging out with friends and learning from past legislative elections. The negative impact of the practice of political brokerage in the 2019 legislative elections in the community of Muara Kelingi village public attitude that does not trush the government, disrupting harmony and harmony and the inability of legislative elections based on the law.

Keyword : Political Brokerage, Legislative Elections

Indralaya, 22 Desember 2020

Approved by,

Advisor I	*Advisor II*
Dr. Zulfikri Suleman, M.A	Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195907201985031002	NIP. 195910241985032002

Head of Sociology Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Dr. Yunindyawati, S.Sos. M.Si
NIP 197506032000032001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.3.1 Tujuan Umum 6
1.3.2 Tujuan Khusus 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Penelitian Terdahulu 7
2.2 Kerangka Pemikiran 12
2.2.1 Broker Politik 12
2.2.2 Pemilihan Umum 13
2.2.3 Fenomenologi 15
2.2.4 Bagan Kerangka pemikiran 17

BAB III METODE PENELITIAN **18**
3.1 Desain Penelitian 18
3.2 Lokasi Penelitian 18
3.3 Strategi Penelitian 18

3.4 Fokus Penelitian 19
3.5 Jenis dan Sumber Data 19
3.5.1 Data Primer 19
3.5.2 Data Sekunder 20
3.6 Penentuan Informan 20
3.7 Peranan Peneliti 20
3.8 Unit Analisis Data 21
3.9 Teknik Pengumpulan Data 21
3.9.1 Observasi 21
3.9.2 Wawancara Mendalam 21
3.9.3 Dokumentasi 22
3.10 Teknik Pemeriksaan Data dan Keabsahan Data 22
3.11 Teknik Analisis Data 23

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 25

4.1 Sejarah Musi Rawas 25
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Muara Kelingi 26
4.2.1 Letak Administratif 27
4.2.2 Keadaan Alam 27
4.3 Gambaran Umum Kondisi Sosial Dan Budaya 28
4.3.1 Komposisi Penduduk 28
4.3.2 Pendidikan 29
4.3.4 Agama 30
4.4 Fasilitas Umum 31
4.4.1 Pasar 31
4.4.2 Sarana Kesehatan 31
4.5 Organisasi 33
4.6 Deskripsi Informan 33
4.6.1 Informan Kunci 34
4.6.2 Informan Utama 35
4.6.3 Informan Pendukung 37
4.7 Keterbatasan Peneliti 38

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 39

5.1 Motif Seseorang Menjadi Broker Politik 39
5.1.1 Motif Untuk (in-oder-to-motive) 39
5.1.2 Because Motive (Motif Karena) 72
5.2 Dampak Negatif Adanya Praktik Broker Politik Di Kelurahan Muara Kelingi 75
5.2.1 Tidak Percaya Terhadap Pemerintah 75
5.2.2 Membuat Kerukunan Dan Keharmonisan Masyarakat Terganggu .. 79
5.2.3 Tidak Berjalannya Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang 81

BAB VI PENUTUP **83**
6.1 Kesimpulan 83
6.2 Saran 83

DAFTAR PUSTAKA **85**
LAMPIRAN **87**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 11
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian 19
Tabel 4. 1 Komposisi Penduduk 28
Tabel 4. 2 Jumlah Pemilih 29
Tabel 4. 3 Sarana Pendidikan Kelurahan Muara Kelingi 30
Tabel 4. 4 Tabel Daftar Masjid Dan Mushola 31
Tabel 4. 5 Sarana Kesehatan 32
Tabel 4. 6 Organisasi 33
Tabel 4. 7 Informan Kunci 34
Tabel 4. 8 Informan Utama 35
Tabel 4. 9 Informan Pendukung 37
Tabel 5. 1 Macam-Macam Imbalan 57
Tabel 5. 2 Barang Diterima Oleh Pemilih 61
Tabel 5. 3 Komunikasi broker politik dengan individu yang memiliki hak suara 61
Tabel 5. 4 Komunikasi Calon Legislatif Dengan Broker Politik 62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4. 1 Peta Keluhan Muara Kelingi 27
Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk..... 28
Gambar 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 88
Lampiran 2 Transkrip Wawancara..... 91
Lampiran 3 Dokumentasi..... 111
Lampiran 4 Hasil Pengecekan Plagiarisme..... 114
Lampiran 5 SK Judul Skripsi 115
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi I..... 116
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi II 117

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ANDA PUNYA RENCANA, SAYA PUN PUNYA RENCANA AKAN TETAPI KENYATAAN KEHENDAK SANG PENCIPTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada

- Allah SWT sebagai tempatku mengadu dan meminta pertolongan
- Orang tua yang selalu memberi doa, dukungan, perhatian, dan nasihat untuk saya hingga sampai sekarang ini.
- Bapak dan ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi yang membangun dan semua dosen dan staf FISIP UNSRI
- Saudara/saudariku yang telah memberikan motivasi, nasihat semangat
- Almamater Kebanggaanku

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut paham demokrasi dimana dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh warga negara, melalui proses yang sudah ditentukan oleh lembaga terkait atau yang berdaulat yang mengatur pemilihan tersebut. Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilihan umum merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Citra Umbara 3 : 2017).

Pemilihan umum merupakan unsur pokok dalam sistem politik demokrasi terlepas dari proses penyelenggaraan pemilu, semua negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi senantiasa melaksanakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dan mereka yang akan duduk di kursi pemerintahan di negara tersebut. Secara formal-prosedural pemilihan umum itu memiliki tujuan utama untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat dilembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dan juga kepala pemerintahan sebagaimana dilaksanakan Indonesia sejak tahun 2004.

Fenomena yang selalu muncul dalam setiap pemilihan umum di Indonesia yaitu praktik broker politik. Istilah ini, menyebutkan suatu pekerjaan yang menghubungkan antara pembeli dan penjual yang membutuhkan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Moeliono calo merupakan individu yang bekerja memanfaatkan kemampuannya dalam mendekati masyarakat dengan memperoleh upah dari klien nya (Wati, 2011:11). Pada masa kampanye, broker sendiri menggunakan kemampuannya dengan melalukan pendekatan dan menarik simpati masyarakat pemilih dengan tujuan mensosialisasikan calon yang menjadi klien nya. Para broker ini, merupakan jejaring klientelisme yang dimiliki oleh para calon kandidat tertentu guna membantu mendapatkan suara masyarakat di tengah

persaingan pasar bebas pemilihan umum yang terbuka. Para calon kandidat, melakukan perekrutan broker politik dari masyarakat setempat seperti petani, buruh, dan wirausaha yang tidak berasal dari partai politik dengan mendapatkan kepercayaan dari calon untuk mendekati masyarakat dalam proses pemilihan umum dengan memperoleh upah yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Aspinall dan Sukmajati (2015) menjelaskan terdapat beberapa alasan kandidat melatarbelakangi broker sangat vital dalam posisinya dalam menghubungkan kandidat dan politisi. Pertama, kandidat menyadari bahwa tidak bisa berinteraksi langsung dengan pemilih yang jumlah besar. Kedua, praktik politik uang menyisakan rasa kekhawatiran para calon kandidat ketika uang mereka diberikan tidak mendapatkan imbalan berupa suara sebanding dengan tujuan yang diberikan. Ketiga, para broker adalah aktor politik yang benar mengetahui kondisi di lapangan (Pojokwacana, 7 Oktober 2019).

Para kandidat, memilih broker politik dari masyarakat setempat sebab mereka mengetahui kondisi masyarakat baik seperti ekonomi, budaya, pendidikan dan sosialnya. Dengan menggunakan, metode-metode yang berbeda dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilih potensial yang berbeda-beda latar belakang sosialnya.

Pertama, jika masyarakat dari kalangan ekonomi atas para kandidat legislatif menggunakan broker politik dari kalangan yang sama dengan masyarakat pemilih potensial. Akan mudah dalam melakukan sosialisasi kandidat tertentu. Broker politik sendiri berhati-hati dalam mendistribusikan imbalan atas pembelian suara dan tidak mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kedua, jika masyarakat kalangan ekonomi menengah para kandidat legislatif memilih broker dari kalangan profesi wirausaha. Sebab, agar mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilih potensial. Ketiga, jika masyarakat dari kalangan ekonomi rendah kandidat memilih broker dari kalangan yang sama seperti petani dan buruh. Pada kalangan ekonomi rendah ini broker politik mudah menarik simpati suara masyarakat sebab mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga (Sumber observasi kepada masyarakat Kelurahan Muara Kelingi).

Adapun model pembagian uang oleh broker politik berdasarkan calon pemilih potensial Triantini (2015) mengemukakan bahwa *metode by name by address*

terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, terstruktur dan administrasi. Model ini adalah penyaringan data yang dilakukan oleh tim sukses resmi seperti dari partai politik guna dapat mencocokkan data yang diberikan oleh broker guna kepentingan sangat pencoblosan. Tujuannya ialah agar uang yang tersebar benar-benar akurat. Kedua, ter administrasi tidak mengikat. Model ini broker menyerahkan data nama, alamat, nomor KTP calon pemilih. Akan tetapi, kandidat tidak melakukan cek ulang data dengan ini sering kandidat tertipu. Ketiga, tidak ter administrasi mengikat. Model ini secara administratif siapa saja para calon pemilih potensial tidak disetorkan kepada calon kandidat. Biasanya model seperti ini terjadi ketika broker memiliki kedekatan hubungan emosional dengan calon pemilih dari segi kelompok atau komunitas tertentu sehingga mudah memantau nya. Para kandidat pun sudah mempercayai karena telah memiliki kedekatan dengan para broker sehingga tidak terlalu khawatir ditipu.

Broker politik digunakan oleh para calon dalam pemilihan umum seperti calon legislatif ataupun Kepala Daerah. Dengan tujuan menarik simpati masyarakat supaya memilih calon tertentu. Menurut Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa ada 900 broker politik dari hasil penelitiannya secara random dengan wawancara caleg terpilih tingkat DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota di empat provinsi (Suara, 23 Juli 2018). Dari data diatas, dapat kita ketahui bahwa broker politik digunakan oleh para calon dari lapisan atas hingga lapisan bawah.

Menurut Siswanto, Dosen Fisip Unsri, bahwa percaloan di bidang politik semakin marak terjadi masa pemilihan umum. Profesi musiman ini, dengan memanfaatkan kondisi politik akan kebutuhan bakal calon (balon) atau Kepala Daerah untuk mendekati masyarakat pemilih tetap agar suara masyarakat bisa dimobilisir kan. Broker politik Pilkada ini, tidak hanya mendekati masyarakat dengan cara menawarkan janji-janji dari calon legislatif. Namun juga, mendekati masyarakat dengan cara persuasi (ajakan) yaitu menjanjikan kepada masyarakat akan mendapatkan sesuatu seperti pelayanan dasar yang dibutuhkan dan memberikan uang kepada masyarakat (Tribunnews, 11 Agustus 2011).

Broker politik dipilih dari orang-orang terdekat dari calon agar bisa dipercayai dan mudah menerima laporan. Sebab, broker biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, kiai ataupun orang terpandang di daerahnya agar mudah mendekati

masyarakat. Seperti, pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh tahun 2017. Di sini, menekankan pada peran agensi perempuan di dalam konsentasi electoral di Aceh Utara (Kompas, 27 Oktober 2017). Terdapat juga kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah seperti pemilihan lokal di Kabupaten Pati pada tahun 2017 dan juga pemilihan legislatif 2014 di Grobogan, Pati, Blora, dan Rambang (Hartati at.el, 2019).

Praktek broker politik terjadi juga dalam pemilihan umum serentak tahun 2019. Masyarakat, mengakui dimintai photocopy identitas penduduk dengan dalih untuk mendukung salah satu calon legislatif tertentu, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi bahkan pusat sekalipun dengan di iming-imingi dengan uang (Jppn, 08 Febuari 2019). Seperti, terjadi juga di Kelurahan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Tepatnya, pada tanggal 28 Desember 2018 broker politik melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berkunjung cara satu persatu ke rumah masyarakat. Dengan tujuan mendata pemilih potensial. Dengan menggunakan smartphone. broker politik mengambil gambar Kartu Pengenal Penduduk masyarakat dengan di iming-imingi uang sebesar Rp. 100.000 per-KTP. Setelah, mengambil gambar Kartu Pengenal penduduk broker politik melaporkan kepada calon yang menggunakan jasanya atas pekerjaannya (Sumber observasi pada masyarakat Kelurahan Muara Kelingi).

Data ada 3 orang yang menjadi broker politik berlatar belakang berbeda seperti petani, buruh dan wirausaha. Pada sangat sehari sebelum pencoblosan masyarakat mengatakan bahwa menerima distribusi uang Rp. 100.000 per-KTP.Masyarakat, juga memiliki pemikiran bahwa kesempatan masyarakat meminta uang kepada calon ketika pemilu karena pasca pemilu calon yang menang tidak tentu memikirkan nasib masyarakat (Sumber wawancara pada masyarakat Kelurahan Muara Kelingi). Ada hal menarik yaitu terjadinya tawar-menawar dalam proses jual beli suara antara broker politik dan masyarakat setempat. Masyarakat, mengakui bahwa meminta uang besar Rp.1000.000 JT kepada broker politik untuk terdiri 4 anggota keluarganya dan ada juga masyarakat memilih calon tertentu yang memberikan uang terbesar diantara calon tersebut (Sumber wawancara pada masyarakat Kelurahan Muara Kelingi).

Maraknya praktik broker politik dalam proses pemilu menyebabkan dampak negatif. Salah satunya, terjadinya jual beli suara dalam proses pemilu sehingga berlawanan dengan konstitusi negara yaitu pasal 2 Undang-Undang RI No 7 tahun 2017. Praktik, jual beli suara menyebabkan berbagai masalah. Pertama, pada aspek ekonomi para calon yang melakukan politik uang akan mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal yang dihabiskan pada saat pemilihan. Kedua, pada aspek sosial-politik dan budaya yaitu putusnya hubungan kekeluargaan diantara anggota masyarakat.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini di Kelurahan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, karena terjadinya praktik broker dalam melakukan jual beli suara pemilihan umum serentak tahun 2019. Dan terjadi negosiasi antara broker dan masyarakat di Kelurahan Muara Kelingi. Peneliti mengambil masalah broker politik karena suatu fenomena yang sering terjadi ketika pemilihan umum sehingga berlawanan dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka masalah ini di kaji karena fenomena broker politik di Kelurahan Muara Kelingi di anggap masalah yang biasa saja. Selain itu masalah broker politik merupakan masalah politik yang seharusnya bisa diantisipasi. Fakta nya, masyarakat justru menunggu sasaran dari broker politik untuk mendistribusikan dana. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Fenomena Broker Politik Di Masyarakat Kelurahan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana fenomena broker politik di masyarakat Kelurahan Muara Kelingi pada pemilihan legislatif Tahun 2019?

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Apa motif yang mendorong seseorang menjadi broker politik di Masyarakat Kelurahan Muara Kelingi kabupaten Musi Rawas pada pemilihan legislatif tahun 2019?

2. Apakah dampak negatif adanya praktek broker politik di masyarakat kelurahan Muara Kelingi kabupaten Musi Rawas pada pemilihan legislatif tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada 2 tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui fenomena broker politik di masyarakat Kelurahan Muara Kelingi kabupaten Musi Rawas pada pemilihan legislatif tahun 2019?

1.3.2 Tujuan Khusus

1.Untuk mengetahui motif seseorang menjadi broker politik di Kelurahan Muara kelingi kabupaten Musi Rawas.

2. Ingin mengetahui dampak negatif adanya praktek broker di Kelurahan Muara Kelingi kabupaten Musi Rawas pada pemilihan legislatif tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis di dalam penelitian ini dapat menyumbang data khususnya dibidang ilmu-ilmu sosial terutama di bidang ilmu Sosiologi Politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diambil pada penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, John W. 2016. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fitriyah, Jauhar. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Komisi Pemilihan Umum. 2017. *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Bandung: Citra Umbara.

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandun*g: PT Remaja Rosdakarya.

Narbuko Cholid at. El. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tjenreng, Zubakhrum. 2016. *Pilkada Serentak*. Jakarta: Pustaka Kemang.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung : Widya Padjajaran.

Jurnal :

Karina, Yovita. 2013." *Pengaruh Pelatihan The Secret Meaning Of Broker Terhadap Keterikatan Kerja Pada Broker Saham*": Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 02 Nomor 02.

Hamudy, Ahmad. 2014." *Political Broker And Budget Mafia In Indonesian Parlement*". Jurnal Bina Praja Volume 06 Nomor 03. http://insurance.blog.gunadarma.ac.id/?file_id=19#.

Laksmita. 2017." *Rasionalitas Jasa Calo Dalam Pengurusan Sim Baru Di Polres Sidoerjo*: Jurnal Paradigma Volume 05 Nomor 01.

Catur, Anisah Siti. 2016.'' *Klausula Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka Dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat Secara Elektronik Online*": Jurnal Hukum Ius Quia Faculty Of Law Volume 24 Issue 1.

Trisno. 2017.'' *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*'': Jurnal Wacana Politik Volume 02 Nomor 02. https://media.neliti.com/media/publications/70296-ID-fenomena-calo-liar.pdf.

Acidienci, Hartati. 2019." *Botoh Dalam Pilkada : Studi Pola Kerja Dan Transformasi Botoh Dalam Pilkada Kudus 2018"*: Jurnal PolGob Volume 1 Nomor 1.

Aspinaal, Rohman. 2017." *Village Head Elections In Java : Money Politics And Brokerage In The Remaking Of Indonesia'a Rural Elite"* : Jurnal Of Southeast Asian Studies Volume 48 Nomor 1.

Harmon Fauziah, Dkk. 2019" *Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milineal Dalam Memahami Bahaya Vote Broker Oleh KPU"* : Jurnal Um Tapsel, Volume 6 Nomor 1.

Internet :

http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/10/10. Akses pada tanggal 12 Agustus 2019.

https://www.jawapos.com/jpg-today/19/04/2019/447-tps-di-sumsel-gelar-pemilu-susulan/. Akses 24 September 2019.

https://katadata.co.id/berita/2019/02/11/bawaslu-catat-28-pelanggaran-pemilu-2019-politik-uang-terbanyak. 16 oktober 2019

http://repository.unair.ac.id/91809/4/FIS%20P%2076%2019%20Akb%20p%20JURNAL_M.%20FACHRI%20ILHAM%20AKBAR_071311333006.pdf.